

# HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

## KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia - Penulis  
**TEMA** : TNI: Reformasi atau Transformasi?  
**SURAT KABAR/MAJALAH** : Koran Tempo

Hari Kamis Tanggal 18 Bulan Juni Tahun 2009 Halaman A10 Kolom 1

### RINGKASAN :

Apakah reformasi TNI sudah terjadi? Reformasi itu sendiri memiliki makna kembali (*re*) ke asal atau bentuk semula (*formation*). TNI sudah kembali ke fungsi militer yang sebenarnya di dalam negara, yaitu TNI sebagai “tentara perang” di mana itu berarti kita harus mendefinisikan secara konkret tugas TNI sebagai militer yang *outward-looking* (menjalankan fungsi eksternal menjaga kedaulatan negara). Logika inilah yang kemudian melahirkan frasa “profesionalisme TNI”. Transformasi itu sendiri dapat diartikan dengan berubah bentuk atau berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. TNI harus berubah menjadi modern karena fungsi *outward-looking* menuntut kapasitas ini. Anggaran pertahanan Negara-negara di dunia selalu meningkat. Negara justru bertindak sebaliknya adalah Indonesia. Melihat perkembangan pembangunan militer di kawasan, siap atau tidak siap pemerintah Indonesia harus segera menaikkan anggaran pertahanan negara guna mentransformasi alutsista TNI yang *out-of-date*. Demikian dituliskan oleh Rahakundini Bakrie, Dosen Politik Universitas Indonesia dan Peneliti Senior IODAS.

### CATATAN :

# TNI: Reformasi atau Transformasi?

Connie Rahakundini Bakrie

DOSEN POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA DAN PENELITI SENIOR IODAS

**H**anya dalam kurun waktu empat bulan, terjadi tujuh kecelakaan pesawat TNI. Kecelakaan terakhir, helikopter Puma SA 330 jatuh di lapangan rumput Pangkalan Udara Atang Sendjaja, Bogor, pada 11 Juni 2009. Rentetan kejadian kecelakaan pesawat TNI pada dasarnya tidak hanya mengorbankan alutsista (alat utama sistem senjata), namun juga menya-nyiaikan prajurit terbaik yang dimiliki TNI. Ini hanya salah satu dari banyak persoalan yang dihadapi TNI. Berdasarkan data, jumlah alutsista TNI AL dan TNI AU yang dapat dioperasikan hanya sekitar 40 persen.

Kerugian negara banyak diakibatkan oleh keterbatasan dan ketidaksiapan alutsista TNI menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Persoalannya, apakah kita perlu memodernisasi alutsista TNI? Sebagian besar alutsista TNI sudah ketinggalan zaman dan berumur 25-40 tahun. Lalu, apa yang harus dimodernisasi dari teknologi yang tertinggal sekitar 30 tahun yang lalu? Bukankah yang dibutuhkan TNI saat ini adalah mengganti semua alutsistanya dengan teknologi terbaru yang sanggup secara efektif dan efisien meng-cover seluruh wilayah kedaulatan NKRI?

Jika dilihat dari sisi finansial, memang anggaran pertahanan selalu menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat menyulitkan TNI dalam menjalankan tugas utamanya menjaga kedaulatan negara secara eksternal. Fungsi eksternal ini sebenarnya mengandung arti bahwa TNI harus memiliki kapasitas untuk menyerang dan menghancurkan musuh di titik-titik terluar kedaulatan NKRI atau di wilayah ZEE, sehingga perang tidak sampai terjadi di wilayah sendiri. Namun, faktanya, reformasi TNI tidak disertai dengan pemenuhan kebutuhan alutsista yang seharusnya dibangun dengan memiliki kapasitas *outward-looking*.

Apakah reformasi TNI sudah terjadi? Runtuhnya Orde Baru akibat tuntutan demokrasi telah mengubah secara fundamental hubungan sipil-militer di Indonesia. Besarnya desakan terhadap militer untuk kembali pada peran pertahanan negara menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. TNI telah kembali kepada jati dirinya sebagai tentara profesional yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI. Artinya, ketika TNI telah melaksanakan keinginan rakyat untuk kembali ke barak, reformasi TNI sudahlah selesai!

Reformasi itu sendiri memiliki makna kembali (*re*) ke asal atau bentuk semula

(*formation*). TNI sudah kembali ke fungsi militer yang sebenarnya di dalam negara, yaitu TNI sebagai "tentara perang" di mana itu berarti kita harus mendefinisikan secara konkret tugas TNI sebagai militer yang *outward-looking* (menjalankan fungsi eksternal menjaga kedaulatan negara). Logika inilah yang kemudian melahirkan frasa "profesionalisme TNI". Namun, perlu disadari bahwa profesionalisme TNI hanyalah retorika semata jika semua kebutuhan TNI untuk menjadi profesional tidak dapat dipenuhi oleh negara. Isu yang relevan dalam masalah profesionalisme TNI sebenarnya adalah mentransformasi TNI.

## Transformasi TNI

Transformasi itu sendiri dapat diartikan dengan berubah bentuk atau berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Masihkah Anda ingat film yang berjudul *Transformers* (2008) dan sekuel keduanya yang berjudul *Transformers: Revenge of the Fallen* (2009), di mana para robot bisa berubah bentuk menjadi mobil? Para robot tersebut dikatakan sebagai *transformer* karena dapat berubah bentuk yang

berbeda dari bentuk awal. Demikian juga transformasi TNI. Apa yang harus diubah dari TNI? Dalam konteks ini, TNI harus memiliki kapasitas untuk menyerang musuh. Sehingga dibutuhkan alutsista yang berkemampuan perang multifungsi dan jauh dari daratan (perang laut dan udara). Mengingat bahwa alutsista TNI sudah berumur tua, yang artinya juga ketinggalan teknologi, perlu dilakukan transformasi alutsista TNI.

TNI harus berubah menjadi modern karena fungsi *outward-looking* menuntut kapasitas ini. Modern di sini bukan berarti memodernisasi teknologi alutsista TNI yang sudah tua, namun mengganti teknologi alutsista dengan generasi terbaru. Tidak ada yang dapat dimodernisasi dari teknologi yang sudah kedaluwarsa. Yang dapat dilakukan untuk mewujudkan TNI profesional hanyalah mentransformasi alutsista TNI. Tidak ada pilihan lain bagi TNI dalam menjalankan tugas dan kewajiban utamanya yang bersifat eksternal, menjaga kedaulatan NKRI secara efektif dan efisien, jika tidak melakukan transformasi alutsista!

## Kesiapan pemerintah

Anggaran pertahanan negara-negara di dunia selalu meningkat. Negara yang justru bertindak sebaliknya adalah Indonesia. Anggaran pertahanan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan tergolong paling rendah, bahkan untuk tahun 2009, hanya sebesar 0,65 persen PDB, sementara rata-rata anggaran pertahanan negara-negara di Asia Selatan mencapai 3-5 persen PDB. Negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia, terus menambah kapasitas alutsistanya menjadi modern sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahkan baru-baru ini dikeluarkan buku putih pertahanan Australia (2009), di mana Australia mencanangkan pembangunan kapasitas militernya secara modern dengan melakukan *up-grade* atas kapal selamnya dan membeli pesawat tempur multifungsi dengan generasi teknologi terbaru, F-35.

Melihat perkembangan pembangunan militer di kawasan, siap atau tidak siap pemerintah Indonesia harus segera menaikan anggaran pertahanan negara guna mentransformasi alutsista TNI yang *out-of-date*. Jika jangka waktu transformasi TNI adalah 30 tahun ke depan, dibutuhkan anggaran pertahanan yang mencapai persentase dua digit dari PDB, yaitu rata-rata sebesar 11,4 persen PDB. Patut dicatat, anggaran sebesar ini pun hanya akan mencakup penguatan personel serta alutsista semata dan belum dapat memenuhi faktor faktor lain termasuk infrastruktur, *training* pada sistem peralatan baru, juga tidak termasuk pada pengembangan industri dan teknologi yang seyogyanya akan memerlukan anggaran besar mengikuti tren kemandirian alutsista yang kita tetapkan.

Berdasarkan berbagai hal di atas, mau tidak mau pemerintah harus tetap konsekuen dalam membangun profesionalisme, yaitu dengan transformasi TNI. Kedaulatan suatu negara akan terancam jika tidak memiliki militer yang kuat. Jika pemerintah Indonesia tidak segera melakukan transformasi TNI menjadi TNI yang profesional dalam artian yang sebenarnya, taruhannya adalah kedaulatan negara. Satu hal yang harus dipahami oleh elite politik dan pemimpin bangsa adalah prinsip para jenderal hebat di dunia bahwa kita harus membiarkan para negara tetangga membangun kekuatan pertahanannya, tetapi jangan sampai membiarkan mereka lebih kuat dari kita sehingga mereka berpotensi menjadi *our next enemy*. ●